



07 MAR 1987

KAJIAN TENTANG PENDIDIKAN NILAI DI INDONESIA :

**Hasil Penelitian Pelaksanaan Program Pengajaran
PMP Di Sekolah Menengah Pertama (SMP)
(Seri : III B)**

**DOKUMENTASI
UNIVERSITAS TERBUKA**

Oleh
Kuswaya Wihardit

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TERBUKA
DAN
BALITBANG DIKBUD DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BEKERJASAMA DENGAN
INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH CENTRE
JAKARTA, 1987.**

KATA PENGANTAR

Laporan kajian lapangan program pengajaran PMP di sekolah dilaporkan dalam 3 seri yaitu seri SD, SMP dan seri SMA. Hal ini dilakukan karena di masing-masing sekolah terdapat keunikan dalam pelaksanaannya, walaupun bukan keunikan yang menunjukkan suatu perbedaan yang mendasar. Disamping alasan tersebut juga karena laporan ini disajikan dalam bentuk deskripsi yang menampilkan data kualitatif dan kuantitatif, sedangkan data kuantitatifnya disajikan masih dalam bentuk persentase dan belum dianalisis dengan metode korelasi. Oleh karena itu belum dapat disajikan laporan yang terpadu dan menyeluruh antara SD, SMP dan SMA.

Laporan ini ialah laporan seri SMP, yang datanya berdasarkan hasil wawancara, pengamatan dalam kelas, pengamatan di luar kelas dan angket.

Sebagai akhirul kata kami haturkan banyak terima kasih kepada para guru, para kepala sekolah, para siswa, para staf PUSLITABMAS UT dan pihak lainnya yang telah banyak membantu kami dalam rangka penyelesaian laporan ini. Semoga amal bakti saudara-saudara sekalian mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan YME.

Pondok Cabe, 1 Januari 1987

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
D A F T A R I S I	ii
BAB I. GAMBARAN UMUM SEKOLAH	
A. Lingkungan Sekolah	1
B. Kelengkapan Sekolah	2
C. Keadaan Kepala Sekolah	3
D. Keadaan Guru	4
II. USAHA KEPALA SEOLAH DALAM MENINGKATKAN PENGAJARAN PMP	6
III. PROGRAM PENGAJARAN PMP	
A. Proses Belajar Mengajar	7
B. Konsistensi materi	11
C. Pengembangan Pengajaran PMP	17
D. Pelaksanaan PMP dalam kegiatan sekolah	21
IV. TANGGAPAN GURU DAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENGA- JARAN PMP	29
V. KOMENTAR DAN SARAN	
A. Komentar	34
B. Saran	41

ooOOoo

PENDAHULUAN

Kajian program pengajaran PMP di tingkat sekolah baik di SD, SMP maupun SMA bermaksud untuk mengetahui apakah nilai luhur Pancasila yang dipesankan oleh MPR melalui beberapa TAP-nya dilaksanakan secara konsisten sampai di tingkat sekolah. Untuk melihat konsistensi ini perlu ditelusuri proses pengembangan nilai luhur Pancasila tersebut dari beberapa TAP MPR yang dituangkan dalam kurikulum sekolah, kemudian dijabarkan ke dalam buku paket dan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Untuk jelasnya maksud tersebut dijabarkan ke dalam beberapa tujuan khusus seperti berikut:

1. Untuk memperoleh gambaran tentang prosedur pengembangan dan penuangan nilai dan cita-cita luhur Pancasila ke dalam kurikulum sekolah, sehingga memungkinkan untuk dijabarkan kepada satuan-satuan nilai yang lebih kecil dan dapat diajarkan di sekolah.
2. Untuk mengetahui cara yang digunakan oleh guru-guru dalam mengembangkan nilai dan cita-cita luhur Pancasila yang digariskan oleh kurikulum sekolah ke dalam bentuk satuan-satuan pelajaran dan kegiatan proses belajar mengajar serta evaluasi hasil belajar.
3. Untuk mendapatkan gambaran tentang usaha-usaha yang ditempuh oleh guru dalam mendorong siswa untuk menerapkan nilai moral Pancasila ke dalam perilaku kehidupan sehari-hari.
4. Menemukan kelebihan dan kelemahan dalam pengembangan program mengajar PMP baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun dampaknya, sehingga informasi tersebut dapat dipergunakan untuk perbaikan dan peningkatan perogram pengajaran PMP.

Untuk mencapai maksud tersebut maka dilakukan suatu kajian dengan menggunakan 3 sampel daerah yaitu propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan propinsi Sumatera Barat. Dari masing-masing propinsi diambil 2 daerah Tingkat II yaitu kotamadya di ibu kota propinsi dan satu kabupaten. Dengan demikian seluruhnya terdapat 6 daerah kotamadya/kabupaten yang dijadikan sampel daerah.

Sedangkan sampel sekolah di tiap kotamadya/kabupaten diambil 2 SD, 2 SMP dan 2 SMA yang terdiri dari 1 di daerah pinggiran kota dan 1 di ibu kota. Jadi jumlah seluruh sampel sekolah ialah 12 SD, 12 SMP dan 12 SMA. Kelas yang dijadikan sampel ialah kelas III dan VI untuk SD dan kelas III saja untuk SMP dan SMA. Dengan demikian terdapat 12 kelas III SD, 12 kelas VI SD, 12 kelas III SMP dan 12 III SMA, yang jumlah seluruhnya ialah 48 kelas.

Kajian dilaksanakan dengan 2 cara yaitu studi dokumentasi dan studi lapangan. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari semua dokumen yang berhubungan dengan pengajaran PMP, dan studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan guru, Kepala Sekolah dan pejabat Kanwil Depdikbud, pengamatan langsung dalam kelas serta pemberian angket terhadap siswa.

Dengan kajian seperti itu maka dilakukan analisis yang pada dasarnya melihat bagaimana yang seharusnya terjadi dalam program pengajaran PMP (dokumentasi) dan bagaimana yang terjadi di lapangan. Dengan demikian dapat dibandingkan antara yang seharusnya dengan yang sungguh-sungguh terjadi di sekolah. Namun dalam laporan ini perbandingan tersebut disajikan dalam bentuk persentase, kekurangan dan kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi.

Laporan lapangan ini disajikan dalam 3 seri yaitu seri Sekolah Dasar, seri SMP dan SMA. Laporan ini adalah khusus tentang studi lapangan di SMP.

BAB I GAMBARAN UMUM SEKOLAH

A. Lingkungan Sekolah

Sekolah Menengah Pertama sekarang ini menyebar sampai di tingkat kecamatan bahkan desa. Ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan selama dasawarsa terakhir ini lebih besar jika dibandingkan dengan dasawarsa-dasawarsa sebelumnya. Bukan hanya dalam penambahan jumlah sekolah, tetapi juga penyempurnaan kurikulum dan bahan belajar terus ditingkatkan.

Berdasarkan pengamatan di tiap Sekolah Menengah Pertama, lingkungan sekolah di tingkat kabupaten dengan mudah dapat dibedakan mana yang termasuk sekolah pusat kota dan mana sekolah yang termasuk pinggiran kota. Akan tetapi bagi sekolah di kotamadya (pusat kota) agak susah membedakan sekolah di kota dengan dipinggiran kota. Dengan demikian kemungkinan tidak terdapat perbedaan yang menyolok antara lingkungan sekolah dalam kota dengan di pinggiran kota.

Dari hasil pengamatan di sekolah-sekolah setiap sekolah rata-rata mempunyai kelas 27 buah dengan rentangan dari 11 sampai dengan 37 kelas. Sedangkan jumlah muridnya rata-rata 1.100 orang dengan rentangan dari 461 sampai dengan 1.720 orang. Sekolah yang paling kecil terdapat di Sumatera Barat, sedangkan sekolah yang paling besar terdapat di Jawa Barat.

Lokasi sekolah pada umumnya terletak di daerah yang mudah terjangkau oleh kendaraan, serta di daerah pemukiman yang banyak penduduknya. Akan tetapi kebanyakan sekolah yang berada di kota (Jakarta) terletak di pinggiran jalan besar yang kadang-kadang terganggu, karena bunyi kendaraan yang lewat. Disamping itu terdapat pula sekolah (Bandung) yang terletak dekat terminal dan tempat lain yang mengganggu. Tentunya hal ini membawa pengaruh buruk terhadap kegiatan sekolah.

Untuk mengatasi pengaruh buruk dari luar, sementara ini dapat diatasi dengan memagar seluruh sekolah agar orang luar tidak masuk. Namun tentunya ini tidak menjamin akan aman selamanya, sewaktu-waktu pagar tersebut tidak akan berarti lagi. Namun demikian sampai saat ini tidak sampai mengganggu proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar tetap berlangsung sebagaimana mestinya.

B. Kelengkapan Sekolah

Walaupun nampaknya Sekolah Menengah Pertama ini dari segi fasilitas sudah memadai, gedungnya rata-rata cukup bagus, alat peraganya tersedia banyak baik di ruang guru maupun di ruang kelas, namun kelengkapan lainnya ternyata belum banyak dimiliki oleh sekolah.

Berdasarkan data yang terkumpul ternyata bahwa tidak semua sekolah mempunyai kelengkapan berikut ini:

1. Buku Kurikulum/GBPP 75 hanya 67% yang mempunyai, sedangkan Kurikulum/GBPP 84 belum mempunyai sama sekali.
2. Buku pedoman pembinaan guru hanya 55% saja sekolah yang sudah mempunyai.
3. Buku pedoman khusus guru untuk pelajaran PMP hanya 45% yang sudah mempunyai.
4. Buku paket PMP, semua sekolah sudah memiliki, namun masih jauh daripada cukup, sekolah hanya mempunyai sekitar 5% dari jumlah murid yang ada.
5. Terdapat beberapa sekolah yang berlangganan majalah dan koran sebagai sumber bahan tambahan. Sebagian besar dari sekolah yang sudah mempunyai kelengkapan ini ialah sekolah di kota besar seperti Kodya Bandung dan Jakarta.
6. Alat peraga untuk mata pelajaran PMP ternyata masih sangat kurang, atau bahkan tidak ada sama sekali. Memang terdapat beberapa gambar para pahlawan bekas gambar almanak, akan tetapi alat peraga yang dibutuhkan dalam pelajaran PMP bukan hanya gambar/peta para pahlawan.

Berdasarkan pengamatan di sekolah, tidak ada keistimewaan alat atau perlengkapan bagi pelajaran PMP. Begitu pula halnya tindakan Kepala Sekolah juga tidak mengistimewakan PMP sebagai mata pelajaran yang mengemban pembinaan moral.

C. Keadaan Kepala Sekolah

Kepala Sekolah adalah orang yang sudah berpengalaman mengajar di dalam kelas selama puluhan tahun. Oleh karena itu tidak heran apabila mereka sudah berumur 40 tahun keatas. Dari Kepala Sekolah yang dihubungi ternyata 33% berusia dibawah 50 tahun dan 67% berusia diatas 50 tahun, dan semuanya beragama Islam.

Para Kepala Sekolah mempunyai latar belakang pendidikan yang berlainan satu sama lain, yaitu Sarjana Muda dan Diploma III sebanyak 44,4%, Diploma II sebanyak 11%, Sarjana 22% dan PGSM/PI sebanyak 11%. Pendidikan mereka dari berbagai jurusan di antaranya Biologi, Bahasa Indonesia, Sejarah dan sebagainya. Disamping itu tidak ada seorang pun di antara mereka yang pernah mengajar PMP, namun mereka sudah memperoleh penataran baik PMP (44,4%), PSPB 44% dan P4 (28%). Disamping itu terdapat Kepala Sekolah yang belum sama sekali mendapat penataran kecuali P4 sebanyak 22%.

Kepala Sekolah juga termasuk orang sibuk, ia tidak saja sebagai Kepala Sekolah tetapi aktif terlibat dalam berbagai kegiatan misalnya sebagai pengurus BP3 (67%), pengurus PGRI (89%), pengurus koperasi (67%), pengurus/anggota KORPRI (89%), RT/RW dan kelurahan (2%) dan kegiatan lainnya. Dengan aktifitas seperti itu kita dapat membayangkan betapa sibuknya mereka. Mungkinkah seorang Kepala Sekolah dapat membina PMP baik sebagai suatu program pengajaran, atau sebagai pembina moral. Tentunya hal ini tidak boleh terjadi, sibuk atau tidak pembinaan harus berjalan.

Di sini dikemukakan tentang keadaan Kepala Sekolah untuk dapat memberikan gambaran, sampai sejauhmana keterlibatan Kepala Sekolah terhadap bidang-bidang studi, proses belajar mengajar, dan sebagainya

yang berkaitan dengan kegiatan edukatif disamping yang ditangani secara rutin yaitu tentang administrasi.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, ternyata bahwa Kepala Sekolah tidak banyak terlibat dalam mata pelajaran atau bidang studi. Tugas Kepala Sekolah ialah memberikan kemudahan bagi guru-guru baik berupa policy, maupun kelengkapan. Dengan demikian gurulah yang sepenuhnya bertanggungjawab dalam pelaksanaan bidang studi. Hal ini tidak berarti bahwa Kepala Sekolah melepaskan diri dari tanggung jawabnya.

D. Keadaan Guru

Seluruh guru PMP di SMP yang dijadikan sampel dalam kajian ini berjumlah 32 orang yang terdiri dari 44% laki-laki dan 56% perempuan. Kebanyakan mereka berumur diatas 40 tahun (50%) dibawah 30 tahun 25% dan antara 30 - 40 tahun sebanyak 25%. Mereka juga sudah berpengalaman antara 6 - 10 tahun sebanyak 50%, kurang dari 5 tahun sebanyak 34% dan 26% diatas 15 tahun. Namun dari mereka yang diamati kelasnya rata-rata berpengalaman 10 tahun keatas.

Latar belakang pendidikan guru PMP sangat beragam, yaitu berijazah Diploma I sebanyak 33%. Diploma III dan Sarjana Muda sebanyak 33%, Diploma II sebanyak 1%, Sarjana 0,8% dan berijazah SPG sebanyak 1%, dan SMTA lainnya 0,8% sedangkan PGSLP (gaya lama) sebanyak 30,4%.

Satu hal yang sangat mengherankan ialah bahwa dari seluruh guru sampel hanya 38% saja yang berasal dari jurusan PMP, lainnya sebanyak 62% bukan jurusan PMP tetapi diluar PMP misalnya Bahasa Indonesia, IPS dan bahkan IPA. Guru-guru yang bukan dari jurusan PMP ini berpendapat bahwa ia sudah menyenangi pelajaran PMP, bahkan apabila mereka diminta mengajar jurusannya sendiri, ia tak sanggup dan sudah banyak lupa. Akan tetapi dari guru tersebut ada juga yang mengajar dalam mata pelajaran lain, namun kebanyakan mengajar di sekolah lain terutama swasta.

Para guru PMP semuanya (100%) sudah mendapat penataran P4, namun hanya 84% saja dari mereka yang sudah mendapat penataran PMP. Pada kesempatan berikutnya ingin ditatar PMP untuk menambah pengetahuan dan

menyesuaikan dengan perkembangan PMP. Penataran ini memang sangat diharapkan karena mereka hampir semuanya tidak mempunyai buku pedoman PMP.

Guru-guru PMP mengajar sangat beragam, ada yang mengajar di kelas tertentu saja, misalnya kelas III saja, tetapi ada juga yang merangkap mengajar dengan di kelas lain, misalnya kelas II. Hal ini tergantung pada jumlah guru PMP di sekolah tersebut, apabila memungkinkan maka setiap guru hanya memegang kelas tertentu saja misalnya kelas III, kelas II dan kelas I dipegang oleh guru yang berlainan. Keadaan seperti ini sama saja baik di SMP pinggiran kota atau di pusat kota apabila gurunya kurang, maka guru PMP merangkap di beberapa kelas. Namun hampir seluruh sekolah di pusat kota rata-rata gurunya sudah cukup.

Dalam suatu sekolah, disamping mengajar guru-guru juga aktif dalam bidang lain, biasanya aktif menjadi pembina di sekolah. Begitu pula halnya dengan guru PMP yang diamati, walaupun demikian ada pula guru yang tidak aktif dalam kegiatan lain (ekstra kurikuler). Berdasarkan data yang diperoleh terdapat beberapa guru PMP yang aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler sebagai pembina di antaranya dalam kegiatan:

- | | | |
|----------------------------------|----------|-----|
| a. Pramuka | sebanyak | 75% |
| b. OSIS | sebanyak | 79% |
| c. Palang Merah Remaja (PMR) | sebanyak | 38% |
| d. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) | sebanyak | 38% |
| e. Patroli Keamanan Sekolah | sebanyak | 31% |

Walaupun hanya sebagian saja dari guru PMP yang aktif dalam kegiatan tersebut namun siswanya aktif secara penuh, karena ada guru khusus lain yang menangani kegiatan tersebut. Walaupun guru-guru tersebut aktif dalam berbagai kegiatan, namun mereka tetap menjalankan tugasnya sebagaimana biasa.

BAB II

USAHA KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PENGAJARAN PMP

Sebagaimana telah diuraikan di Bab terdahulu bahwa Kepala Sekolah adalah orang yang sibuk karena bukan saja menangani tentang administrasi sekolah dan pembinaan sekolah tetapi juga hal-hal lain yang sebenarnya di luar sekolah seperti dalam organisasi dan kegiatan KORPRI, PGRI, Karakterdes, dan lain-lain, sehingga kegiatan pokok yaitu sebagai pembina di sekolah berkurang.

Menurut keterangan para Kepala Sekolah, tidak ada pembinaan secara khusus untuk PMP, pembinaan dilakukan secara menyeluruh untuk semua segi, untuk seluruh bidang studi atau mata pelajaran dan lain-lain. Pembinaan yang sudah dilakukan saat ini ialah penataran yang dilakukan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan propinsi, dan sekolah hanya menunjuk siapa guru yang belum pernah memperoleh penataran. Guru yang sudah ditatar diwajibkan memberikan penataran kepada guru lain yang belum memperolehnya. Penataran seperti itu disebut sistem penularan. Sistem penataran penularan ini ada yang dikordinir oleh Kanwil Dikbud atau Kandep Dikbud, di mana guru yang sudah ditatar menjadi penatar untuk guru-guru yang ada di wilayahnya.

Lain halnya dengan SMP di Jakarta, di mana sekolah mempunyai wadah yang disebut Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Wadah ini merupakan organisasi bagi guru-guru mata pelajaran/bidang studi yang fungsinya ialah sebagai wadah pembinaan bagi guru-guru terutama guru junior. Tugas MGMP adalah mengkaji setiap mata pelajaran dengan cara, mengidentifikasi permasalahan, mencari alternatif pemecahan masalah, memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap para guru junior.

Inilah beberapa pembinaan yang dilakukan sekolah dalam rangka meningkatkan kemampuan guru-guru, sehingga para guru memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru yang dapat diterapkan dalam tugasnya. Disamping itu rapat guru juga merupakan media pembinaan yang efektif, sehingga antara junior dan senior tidak selalu jauh perbedaannya.

BAB III
PROGRAM PENGAJARAN PMP
DI SEKOLAH

Menurut kurikulum sekolah baik tahun 1975 maupun tahun 1984, pelajaran PMP termasuk Pendidikan Umum yang diberikan di semua kelas dan jenis sekolah baik di SD, SMP maupun SMA masing-masing melaksanakan 2 jam per minggu.

Berdasarkan pengamatan di lapangan PMP diajarkan oleh guru yang sangat beragam baik ijazah maupun latar belakang lainnya. Guru yang mengajar PMP di Sekolah Dasar baik itu klasikal maupun bidang studi, semuanya tidak dari jurusan PMP, sedangkan guru PMP di SMP sebagian besar bukan dari jurusan PMP, dan guru PMP di SMA, dari sekolah yang diamati hanya sebagian saja dari jurusan PMP, lainnya dari jurusan lain yang sangat beragam.

Berikut ini akan diuraikan tentang program pengajaran PMP di sekolah baik melalui proses belajar mengajar, konsistensi pengalihan nilai melalui proses dan kegiatan di sekolah, serta kegiatan lainnya.

A. Proses Belajar Mengajar

Proses Belajar Mengajar (PBM) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk semester I saat diamati mendekati selesai dan siswa segera akan mengikuti tes formatif. Dengan kata lain bahwa materi PMP yang diberikan di SMP hampir habis.

Akan tetapi pada pelaksanaannya di sekolah, keadaan itu sangat berlainan antara Sekolah Menengah Pertama di daerah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sumatera Barat masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Di Jawa Barat banyak sekolah yang sudah melaksanakan tes formatif, tetapi ada pula yang belum, DKI Jakarta juga sudah melaksanakan tes, sedangkan Sumatera Barat belum melaksanakan tes sumatif. Oleh karena itu ketika PBM diamati, kegiatannya juga sangat berlainan. Bagi yang sudah melaksanakan tes sumatif, PBM berupa mengulang pelajaran, sedangkan

bagi yang belum melaksanakan tes, PBM dilaksanakan dengan mengulang, merangkum atau mengajarkan materi yang belum terselesaikan dalam rangka mengejar target kurikulum.

Berdasarkan pengamatan di kelas, terdapat variasi dalam mengajar PMP, namun tidak mengubah pola yang sudah biasa mereka laksanakan. Pada umumnya PBM dapat dibagi dua (2) yaitu:

- mengadakan rangkuman seluruh mata pelajaran PMP dari semua materi yang pada dasarnya sudah diberikan, PBM diberikan dalam rangka persiapan menghadapi tes sumatif;
- memberikan pelajaran baru, yang belum diberikan karena memang belum selesai (mengejar target) atau memberikan pelajaran tambahan, misalnya Pemilu. Topik ini mestinya diberikan semester berikutnya, tapi Karwil memintanya untuk diberikan semester 5 ini.

Berdasarkan pengamatan dalam kelas PMP, nampaknya guru PMP yang diamati sudah cukup berpengalaman yaitu 9 tahun ke atas, walaupun guru PMP lainnya (yang tidak diamati) lebih rendah pengalamannya jika dibandingkan dengan yang diamati. Walaupun sebagian dari mereka bukan dari jurusan PMP, tetapi dari jurusan lain misalnya IPS, Bahasa Indonesia, dan sebagainya, namun nampaknya guru-guru tersebut "cukup" menguasai materi PMP dengan baik.

Dari hasil pengamatan dalam kelas, kegiatan proses belajar mengajar dapat diuraikan seperti berikut:

1. Langkah-langkah mengajar

Proses belajar mengajar PMP di kelas III, pada umumnya menitik-beratkan pada ceramah dan tanya jawab, sekalipun dalam prakteknya sangat bervariasi. Langkah yang ditempuh guru ialah:

- a. Pada awal pelajaran guru memperkenalkan topik yang akan diajarkan, sedangkan di beberapa SMP di propinsi Sumatera Barat guru menyebutkan TIK terlebih dahulu agar siswa mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Nampaknya guru PMP belum menganggap penting bahwa tujuan perlu diketahui oleh siswa. Yang penting bagi siswa dapat memahami materi yang diterangkan

guru, tanpa menyebutkan tujuan secara jelas.

Pada awal pelajaran ini guru berusaha untuk mereview pelajaran yang sudah diberikan. Yang dimaksud dengan mereview ialah:

- Mengajarkan dan membahas PR yang sudah diberikan sebelumnya.
- Mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab siswa, baik ditujukan pada perorangan maupun terhadap seluruh kelas, namun pertanyaan yang diajukan lebih banyak ditujukan pada perorangan.
- mengulang beberapa bagian dari pelajaran yang sudah diberikan untuk mengaitkan dengan pelajaran yang akan diberikan, untuk mengingatkan siswa tentang pelajaran yang lalu, dan memotivasi/mengkonsentrasikan siswa terhadap pelajaran yang akan diberikan. Kegiatan awal ini diberikan kurang lebih selama 4 - 7 menit.

- b. Guru menyampaikan materi pelajaran baru dengan menggunakan metode ceramah yang diselang-seling oleh pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan mengandung maksud yaitu untuk mengecek kemampuan/daya serap siswa, menekankan materi yang dianggap penting, dan menarik perhatian siswa agar lebih memperhatikan pelajaran. Kegiatan penyampaian materi ini menghabiskan waktu antara 15 - 30 menit, tergantung kepada banyaknya materi yang diberikan.

Ada beberapa hal yang menarik untuk dibicarakan bahwa bagi kelas yang mengulang, merangkum dalam rangka menghadapi tes sunatif, guru sebelumnya sudah mempersiapkan sejumlah pertanyaan (+40 butir) yang disusun sendiri, kemudian ditugaskan kepada siswa untuk mencari jawabnya di rumah (PR). Soal yang disiapkan ini sepenuhnya dari buku paket, sehingga siswa harus membaca buku paket agar dapat menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan disusun berdasarkan gabungan beberapa topik (2 - 3 topik).

Ketika di dalam kelas guru mengajukan kembali pertanyaan tersebut satu per satu kepada siswa secara bergiliran, maka pada waktu itu guru menjelaskan kembali. Memang terdapat berbagai cara guru menerangkan, misalnya siswa ditugaskan membacanya terlebih dahulu di rumah dan guru tinggal menerangkan di sekolah.

- c. Pada akhir pelajaran guru mempersilahkan siswa bertanya tentang pelajaran yang baru saja disampaikan. Terdapat beberapa kelas yang sangat hidup, siswa aktif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kelas seperti ini dapat terlihat di sekolah Jawa Barat terutama di pinggiran kota. Pertanyaan yang diajukan siswa juga sangat bagus, menjangkau materi yang cukup luas dan dalam, kadang-kadang mengaitkan antara teori dan praktek. Walaupun demikian terdapat kelas yang mati, siswa sangat pasif. Kelas seperti ini terdapat di Sumatera Barat, dan di pinggiran kota Jakarta.

Apabila tidak terdapat siswa yang bertanya maka gurulah yang mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ada yang diajukan pada seluruh kelas, namun ada pula yang diajukan kepada perorangan. Dalam kesempatan ini guru juga menjelaskan kembali materi yang diberikan, namun apabila jawaban siswa salah guru kurang membahas kembali (feed back) mengapa jawaban tersebut salah.

Inilah langkah-langkah mengajar yang rampaknya sudah menjadi pola umum dalam mengajar di Indonesia, khususnya dalam mata pelajaran PMP. Walaupun demikian masing-masing langkah dilakukan dengan berbagai variasi yang kadang-kadang antara guru yang satu dengan lainnya berlainan. Misalnya di Sumatera Barat guru tidak memberikan apersepsi, tapi langsung kepada materi topik baru. Begitu pula halnya dengan menerangkan, ada guru yang mengawali dengan pertanyaan (lisan), atau mengulang pelajaran yang lalu secara sepintas.

Berdasarkan pengamatan dalam kelas, ternyata pengamat tidak menemukan guru yang menggunakan alat peraga pelajaran. Pada umumnya guru hanya menggunakan papan tulis sebagai alat bantu dalam menjelaskan materi. Mereka mengatakan tidak mempunyai alat peraga, atau untuk PMP cukup hanya dengan papan tulis saja. Disamping itu metode yang digunakan juga hampir seragam yang mereka sebut ceramah bervariasi, yaitu menerangkan dengan diselang-seling tanya jawab.

B. Konsistensi Materi

Apabila kita kaji tentang proses belajar mengajar PMP di kelas III SMP, guru-guru mengajarkan topik yang ada dalam buku paket, karena buku inilah buku wajib bagi siswa dan tidak boleh buku lain. Akan tetapi bagi guru, mereka berusaha menambah dengan buku penunjang lain misalnya TAP MPR, UUD 45, GBHN, PELITA, Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka dan sebagainya.

Ketika pengamatan dilakukan, topik yang saat itu diberikan berkisar tentang: "Mewujudkan Azas Kerakyatan", "Wawasan Nusantara", "Keadaan Alam Perjuangan", "Keadaan Alam Indonesia", "Mata Pencaharian Penduduk", "Bhineka Tunggal Ika", "System Ekonomi Indonesia", "Kebudayaan", "Pelita" dan sebagainya. Topik ini diberikan secara sendiri-sendiri atau kadang-kadang merupakan rangkuman.

Berdasarkan pengamatan di dalam kelas, pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung, dapat dirinci seperti berikut:

a. Kejelasan

Pada dasarnya guru sudah jelas dalam menyampaikan materi. Jelas dalam arti bahwa ucapan dan bahasa yang digunakan oleh guru mudah dipahami oleh siswa karena menggunakan kata-kata sehari-hari, sederhana dan tidak berbelit-belit. Disamping itu jelas dalam arti bahwa sistematika materi; urutan kejadian, terutama antar kejadian sudah tertata dengan rapih sehingga tidak membingungkan siswa.

Begitu pula halnya dalam menyampaikan teori atau konsep, disampaikan dengan jelas, diberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa lebih mudah dalam memahaminya misalnya: dalam mengajarkan pemilihan umum guru memberikan contoh tentang pemilihan RI, ketua kelas dan sebagainya. Walaupun demikian ada pula guru mengajar secara meloncat-loncat dan ini disebabkan karena pelajaran berupa rangkuman.

Dalam mengajukan beberapa pertanyaan, memang apabila dilihat dari susunan kalimatnya, pertanyaan tersebut susah dimengerti, misalnya:

"Bagaimana itu demokrasi langsung".

Pertanyaan ini muncul ketika guru sedang mengajar jenis-jenis demokrasi. Apabila pertanyaan tersebut kita ubah dalam bentuk yang tepat maka bunyinya ialah:

"Apa yang dimaksud dengan demokrasi langsung, coba jelaskan?"

Tetapi anehnya siswa dapat memahami maksud dari pertanyaan tersebut, sekalipun secara bahasa tidak benar. Selama proses belajar mengajar berlangsung pertanyaan yang kabur tersebut sering muncul, tetapi tidak mengganggu jalannya kegiatan.

Sedangkan dalam menjawab pertanyaan siswa, dari segi kejelasan penyampaian pada umumnya sudah cukup jelas. Artinya apa yang dijawab oleh guru, siswa dapat menangkap isinya. Dalam segi memberikan tugas, selama pengamatan pengamat tidak menemukan kegiatan tersebut ada dalam proses belajar mengajar.

b. Ketepatan isi

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa guru-guru yang mengajar PMP sudah cukup senior dan lama berpengalaman mengajar PMP, sekalipun tidak semua guru tersebut berlatar belakang PMP. Oleh karena itu mereka nampak sebagai profil guru yang terampil dan terhormat dimata siswa.

Berdasarkan pengamatan dalam kelas, untuk usia kelas III materi yang disampaikan sudah cukup baik. Guru menerangkan disertai contoh-contoh yang kongkrit yang ada dalam kehidupan siswa sehari-hari. Akan tetapi dari keseluruhan materi yang disampaikan hampir seluruhnya bersifat pengetahuan (ranah kognitif) dan hampir tidak ada yang mengarahkan kepada laku siswa. Ini mungkin didasarkan pada berbagai pertimbangan, di antaranya:

- dalam tes sumatif, dan EBTANAS hampir semua soal dalam bentuk pengetahuan (ranah kognitif);
- untuk mengejar target capaian kurikulum yang sebagian besar juga bersifat pengetahuan.

Dalam mengajar PMP, guru selalu berpedoman kepada buku paket dan ditambah dengan buku/penunjang lainnya. Oleh karena itu tidak ada alternatif lain bagi guru kecuali memperkaya materi yang ada pada buku paket. Yang dimaksud dengan alternatif lain misalnya guru dapat memilih topik yang ada dalam GBPP, akan tetapi ini tidak dapat dilakukan karena tidak semua topik GBPP ada dalam buku paket. Dengan demikian guru hanya menggunakan buku paket karena tes pun didasarkan pada buku paket. Perlu dijelaskan bahwa topik yang ada pada buku paket banyak yang tidak sama dengan topik pada GBPP. Topik pada buku paket kurang lebih 60% dari GBPP (perkiraan guru), tetapi muncul topik lain yang di luar GBPP. Hal ini disebabkan karena buku paket disusun lebih dahulu dari GBPP.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengalihan nilai Pancasila itu tidak semata-mata tergantung pada guru belaka tetapi juga pada para pengembang kurikulum dan buku paket. Hal ini disebabkan karena guru tergantung sepenuhnya pada buku paket. Di samping itu juga dirasakan keadaan lingkungan kurang menunjang terhadap pendidikan moral, karena di lingkungan di luar sekolah daya kontrolnya sangat rendah. Oleh karena itu PMP hanya dapat meningkatkan moral dan watak siswa dalam kaitannya dengan kehidupan kenegaraan saja, sedangkan moral lainnya terlalu banyak faktor yang mempengaruhi. Yang dimaksud dengan kehidupan kenegaraan di antaranya:

- Bagaimana cara menghormati bendera.
- Bagaimana tata tertib melakukan upacara sekolah.
- Bagaimana memasang gambar Kepala Negara dan Wakilnya.
- Bagaimana menghormati para pahlawan nasional.

Sedangkan hal yang berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan banyak sekali dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat itu sendiri, walaupun tidak sesuai dengan tujuan PMP.

Dari uraian tersebut maka pengalihan nilai Pancasila di SMP merupakan pengalihan nilai Pancasila yang ada pada buku paket. Guru kurang kesempatan dan keberanian untuk mengalihkan nilai Pancasila secara utuh sebagai suatu nilai. Oleh karena itu maka buku paketlah yang harus mendapat penggarapan yang mantap agar benar-benar mengemban misi sebagai sumber nilai Pancasila (sumber sekunder).

Berdasarkan pengamatan dalam kelas, guru menyampaikan materi 99% benar, dalam arti sesuai dengan materi PMP. Namun demikian masih terdapat hal yang dirasakan mengganggu. Untuk ini dapat dikemukakan beberapa contoh seperti berikut:

Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa:

G : Pada pemilu yang akan datang, siapa yang dipilih?

S : Presiden dan wakil

G : Ya, tapi sesungguhnya kita memilih wakil rakyat, tetapi nantinya juga memilih presiden dan wakil presiden.

Dari dialog tersebut guru tidak mengatakan dengan tegas bahwa pemilu bukan memilih presiden dan wakil presiden, tetapi DPR (TK II. TK I dan Pusat). Dengan demikian siswa beranggapan bahwa pendapatnya tadi benar.

Dalam suatu proses belajar mengajar PMP, sebagaimana sudah dikatakan sangat bervariasi, tapi pada umumnya ialah ceramah diselingi tanya jawab. Hanya beberapa kelas saja yang nampaknya sangat hidup, siswa sangat aktif bertanya dan menjawab pertanyaan. Kalau dibandingkan antara kelas yang aktif dengan yang pasif, maka kelas aktif (SMP Ciranjang) tidak kurang dari 20 buah pertanyaan yang diajukan siswa, sedangkan kelas pasif (SMP pinggiran Jakarta

dan Padang) tidak ada pertanyaan dari siswa.

Beberapa hal yang menarik diulas kembali, bahwa dalam menyampaikan materi PMP, hampir seluruhnya bersifat pengetahuan, walaupun dalam menyampaikannya disertai dengan contoh-contoh praktis. Misalnya dalam menerangkan azas musyawarah untuk mufakat, guru memberi contoh musyawarah dalam OSIS, persiapan peringatan Maulid Nabi, pemilihan ketua kelas dan sebagainya. Akan tetapi tidak sedikitpun menyinggung bagaimana cara yang baik dalam mengeluarkan pendapat, menghargai pendapat orang lain, cara bertanya dan sebagainya.

Dalam menjelaskan materi atau konsep, guru kadang-kadang membaginya dalam beberapa bagian, jadi tidak diberikan secara sekaligus. Contoh: misalnya dalam menerangkan "demokrasi", guru memberikan tidak dalam bentuk suatu definisi yang utuh akan tetapi berupa contoh-contoh. Demokrasi adalah kekuasaan rakyat dalam bagian lain disebut dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dan lainnya lagi bahwa rakyat adalah sebagai subjek dan sebagainya. Mungkin ini suatu strategi yang diatur guru agar siswa mengerti. Dengan kata lain siswa tidak mengetahui definisi utuh tentang demokrasi, tetapi ia memahami dengan jelas apa itu demokrasi.

c. Relevansi

Satuan Pelajaran adalah wajib dibuat guru sebelum mengajar. Satuan Pelajaran (SP) ini disusun berdasarkan pokok bahasan yang ada pada GBPP. Oleh karena topik GBPP tidak seluruhnya sama dengan buku paket, maka guru mengembangkan SP berdasarkan buku paket. SP disusun guru tergantung kepada bobot/banyaknya materi setiap topik, ada yang setiap topik cukup sekali diajarkan, ada pula yang diajarkan melalui beberapa kali pertemuan. Dengan demikian tidak setiap kali mengajar guru membuat SP, akan tetapi setiap mengajar guru harus mengajar berdasarkan SP.

Berdasarkan pengamatan dalam kelas, pengamat tidak pernah melihat guru mengajarkan PMP dengan menggunakan SP, mereka

menggunakan buku paket. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa guru tidak melakukan persiapan ketika mengajar. Pengamat melihat beberapa catatan guru tentang materi yang diajarkan.

Walaupun demikian pengamat berpendapat bahwa guru konsekwen dengan materi PMP yang harus diajarkan. Artinya materi PMP yang ada dalam buku paket itu yang diajarkan oleh guru, ditambah dengan beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari.

Disamping itu guru dalam mengajarkan PMP selalu tuntas, tuntas disini diartikan bahwa guru mengajarkan PMP selesai menurut sub topik atau topik pelajaran. Kalau topik pelajaran itu sedikit, maka satu topik diajarkan secara tuntas akan tetapi apabila satu topik terdiri dari beberapa sub topik, maka sub topik itu selesai diajarkan.

Contoh:

Topik "mewujudkan azas kerakyatan" terdiri dari beberapa sub topik yaitu:

- a. Azas Demokrasi
- b. Azas kerakyatan, perwakilan, musyawarah dan mufakat sebagai inti demokrasi Pancasila.
- c. Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
- d. Hak dipilih dan memilih Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat.
- e. Lembaga Negara sebagai sarana demokrasi.
- f. Kebebasan mengeluarkan pendapat.

Dari sub topik tersebut, pada saat pengamatan guru hanya sampai pada topik d. Hal ini disebabkan karena materi yang diajarkan terlalu banyak. Namun ini tidak mengganggu atau menghambat konsistensi pengalihan materi.

d. Pengarahan tingkah laku siswa

Di muka sudah disinggung bahwa proses belajar mengajar PMP merupakan kegiatan penyampaian pengetahuan tentang Pancasila dan hampir tidak ditemukan pengarahan tingkah laku secara langsung. Akan tetapi dengan pengetahuan tersebut diharapkan dapat diarahkan

kepada pembentukan sikap terutama sikap dalam kehidupan bernegara (by product) misalnya siswa berlaku hormat terhadap guru, bertindak demokrasi dalam organisasi OSIS atau dalam kelas dan sebagainya.

Disamping itu baik di kelas maupun di sekolah terdapat sejumlah aturan dan tata tertib yang diberlakukan terhadap semua warga sekolah, baik itu siswa, guru, penjaga sekolah dan sebagainya. Tentunya semua tindakan guru merupakan contoh bagi siswa. Apabila ada guru yang membuang sampah sembarangan tentunya ini akan diikuti oleh semua siswa. Dan apabila ada siswa yang melanggar aturan, kemudian tidak diberikan sanksi, maka siswa lain akan mengikuti. Sekolah merupakan wadah yang tepat untuk melatih disiplin dengan menerapkan berbagai aturan. Dan ini akan sangat mudah dikontrol oleh sekolah, siapa yang tidak ikut upacara sekolah, siapa yang tidak pakai seragam dan sebagainya.

Dalam kelas, dalam proses belajar mengajar aturan seperti itu tetap berlaku. Selama pengamatan berlangsung, teguran-teguran dari guru tetap ada terutama bagi siswa yang kurang memperhatikan pelajaran. Akan tetapi siswa tetap mempunyai kebebasan untuk bertindak. Dari keseluruhan PBM dalam kelas sedikit sekali pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Hal ini mungkin disebabkan kehadiran pengamat sehingga siswa tidak berani berbuat yang melanggar aturan kelas.

C. Pengembangan Pengajaran PMP

Dalam bagian ini akan dikembangkan tentang bagaimana guru mengembangkan TIK dan TIU dari Kurikulum/GBPP, pengembangan materi PMP menurut kurikulum dan pengembangan evaluasi belajar.

Sebelum dibahas tentang hal tersebut di atas, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa pengembangan materi PMP tersebut dilakukan melalui Satuan Pelajaran (SP). Dalam SP terdapat komponen TIU, TIK, pokok bahasan, kegiatan belajar mengajar, metode, sumber buku dan evaluasi. Oleh karena itu untuk mengetahui prosedur pengembangan materi PMP juga

erat kaitannya dengan pengembangan Satuan Pelajaran (SP).

Begitu pula halnya dengan buku paket, dalam buku paket terdiri dari komponen uraian materi, rangkuman dan tugas/latihan. Uraian materi ini cukup banyak, rangkuman terdiri dari kurang lebih 15 baris dan tugas dan latihan terdiri dari 2 - 13 soal, yang semuanya tentang pengetahuan dan sedikit sikap. Ada juga beberapa tugas yang berkaitan dengan arahan tingkah laku, tapi nampaknya tidak operasional. Misalnya Bab terakhir buku paket kelas III tentang "Pembangunan dan Kelangsungan Hidup Bangsa" terdapat salah satu tugas yang berhubungan; ikutilah gerakan tabungan yang ada di sekolahnya. Tugas seperti ini tidak jelas dan tidak operasional. "Ikutilah" disini apakah berarti menjadi perabung atau mengikuti perkembangan saja. Disamping itu juga tidak operasional, karena belum tentu semua sekolah menyelenggarakan tabungan.

Pengembangan materi PMP yang dilakukan guru ialah mengembangkannya melalui SP. Dalam kenyataannya guru mengembangkan materi PMP yang ada dalam buku paket.

Langkah-langkah yang dilakukan guru dalam mengembangkan materi PMP tersebut ialah seperti berikut:

1. Mengembangkan TIK berdasarkan TIU yang terdapat dalam GBPP atau dari sub pokok bahasan. Tentunya pokok bahasan yang diambil ialah yang terdapat dalam buku paket, apalagi bila topik GBPP tidak sesuai dengan buku paket.
2. Mengembangkan evaluasi belajar berdasarkan TIK yang dirumuskan. Untuk ini guru sudah baik walaupun evaluasi ini sepenuhnya tentang pengetahuan dan tidak ada yang berkaitan dengan sikap atau tingkah laku. Bentuk tes yang dikembangkan pada umumnya objektif tes, walaupun terdapat beberapa tes isian. Dalam proses belajar mengajar jarang sekali guru mengadakan tes tertulis, akan tetapi berupa pertanyaan lisan yang diajukan pada akhir pelajaran. Kegunaannya ialah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran.

Disamping itu terdapat pula tes formatif yang diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam seminggu. Tes ini dikembangkan sepenuhnya oleh guru berdasarkan pelajaran yang sudah diberikan. Tes ini dikembangkan dari buku paket, artinya guru membuat tes sendiri untuk memperoleh nilai yang akan dimasukkan dalam raport bersama hasil tes sumatif. Sebagian besar tes ini berbentuk tes objektif dan tes isian (essay berstruktur), yang sepenuhnya tentang pengetahuan.

Tes sumatif dikembangkan oleh guru berdasarkan kisi-kisi yang dikirimkan oleh Kanwil Dikbud propinsi. Untuk ini kadang-kadang guru kaget karena kisi yang dikirimkan tidak sesuai dengan materi buku paket dan GBPP untuk semester tersebut. Jika hal ini terjadi maka guru secara maraton mengajarkan materi yang belum pernah diajarkan, akan tetapi ada dalam kisi-kisi yang dikirim Kanwil. Sebagai contoh dapat dikemukakan tentang "Pemilu". Materi ini semestinya diberikan pada semester VI, (semester berikutnya). Akan tetapi dari kisi-kisi tes sumatif yang akan diberikan sudah harus ditekankan pada semester V.

3. Mengembangkan materi PMP

Guru mempunyai kebebasan yang penuh untuk mengembangkan materi sesuai dengan situasi dan kondisi. Akan tetapi kebebasan ini kadang-kadang tidak dapat dimanfaatkan oleh guru. Para guru mengajar berdasarkan urutan materi yang terdapat pada buku paket. Untuk ini kadang-kadang diperkaya dengan bahan penunjang lain seperti buku UUD 45, TAP MPR, Pancasila, Pelita, GBHN, Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka dan sebagainya. Oleh karena sifatnya hanya memperkaya maka yang pokok ialah tetap dari buku paket tersebut. Disamping itu guru juga tidak mempunyai kesempatan untuk memilih topik-topik yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Hal ini disebabkan karena banyaknya materi yang harus diberikan. Guru juga merasa bahwa tidak perlu memilih-milih topik karena semuanya harus diberikan. Kalau ada materi yang saling berkaitan, tinggal

mengupas sedikit dalam pengenalan pelajaran (apersepsi).

4. Perencanaan proses belajar mengajar

Sebagaimana sudah dikemukakan bahwa guru khususnya guru PMP sudah mempunyai pola kegiatan belajar mengajar yang sudah berlangsung dari hari ke hari, bulan ke bulan dan tahun ke tahun. Dengan demikian tidak sulit bagi guru untuk merencanakan proses belajar mengajar, karena tanpa direncanakan juga akan berlangsung seperti pola yang sudah disebutkan di atas.

Dalam GBPP, setiap pokok bahasan sudah dilengkapi dengan metode/strategi belajar dan juga buku sumber. Apabila guru memperhatikan ini maka guru juga tinggal menjabarkan apa yang tertulis di GBPP ke dalam bentuk kegiatan dalam kelas. Guru tidak perlu mencari-cari metode lain. Dan inilah yang selama ini dilakukan oleh guru. Misalnya dalam GBPP sudah tertulis sub pokok bahasan. "Harga menghargai pemeluk agama lain dalam melaksanakan ibadahnya", disitu sudah tercantum metode yang digunakan oleh diskusi kelompok, ceramah bervariasi, dan pemberian tugas. Dengan demikian guru tinggal melaksanakannya.

Lain halnya apabila yang akan dilaksanakan tentang "Memahami Wawasan Nusantara". Topik atau pokok bahasan ini tidak ada pada GBPP untuk kelas III, akan tetapi terdapat pada buku paket bab VII. Senestinya guru merencanakan PBM berdasarkan materi yang akan diajarkan, misalnya mengunjungi penduduk yang mempunyai adat istiadat yang khas, mengunjungi alam luas yang penuh dengan objek wisata dan sebagainya. Akan tetapi hal seperti ini jarang sekali dilakukan karena kurang waktu, perlu biaya dan sebagainya.

Demikianlah apa yang dilakukan oleh guru selama ini. Mereka tidak pernah sulit dan susah-susah dalam mengembangkan proses belajar mengajar. Namun demikian terdapat guru yang berusaha agar siswa aktif dan cepat memahami pelajaran, yaitu guru menyusun sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa di rumah. Jawaban ini terdapat dalam buku paket. Dengan demikian guru berusaha untuk

memaksa siswa membaca buku paket, sehingga pada proses belajar mengajar di kelas siswa sudah mempunyai gambaran tentang materi yang akan diberikan.

D. Pelaksanaan PMP Dalam Kegiatan Sekolah

Dalam uraian ini akan dijelaskan tentang beberapa kegiatan sekolah yang mempunyai kaitan erat dengan program pengajaran PMP. Kegiatan tersebut ada yang dilaksanakan dalam pelajaran PMP ada pula yang di luar pengajaran PMP, tetapi erat kaitannya dengan pengajaran PMP. Berikut ini ialah beberapa kegiatan dan wadah yang dapat digunakan sebagai sarana pembinaan moral.

1. Wadah kegiatan

Beberapa wadah kegiatan di sekolah yang dapat digunakan sebagai sarana pembinaan moral di antaranya ialah:

Wadah kegiatan	% Guru melibatkan siswa	% Guru yang terlibat
a. Pramuka	87	85
b. Palang Merah Remaja	87	67
c. Patroli Keamanan Sekolah	78	69
d. Usaha Kesehatan Sekolah	87	72
e. Pencinta Alam	-	-
f. Paskibraka	59	
j. OSIS	94	94

Wadah kegiatan a sampai dengan d hampir semua sekolah menyelenggarakannya, akan tetapi kegiatan d dan seterusnya belum semua sekolah menyelenggarakannya.

Wadah kegiatan tersebut diselenggarakan tidak khusus untuk pelajaran PMP akan tetapi diselenggarakan sebagai sarana kegiatan

dan latihan siswa dalam bidang organisasi, kemasyarakatan, keamanan, kesehatan dan sebagainya. Wadah kegiatan ini dimanfaatkan untuk membina disiplin, meningkatkan kreatifitas, wadah berorganisasi, menumbuhkan cinta terhadap sesama dan semua umat manusia dan sebagainya. Setiap wadah kegiatan di atas mempunyai pembimbing khusus.

2. Bentuk kegiatan

Terdapat beberapa kegiatan yang pernah dilaksanakan di sekolah. Kegiatan tersebut juga bukan merupakan kegiatan khusus PMP. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lainnya belum pernah dilaksanakan kegiatan khusus dalam rangka mengaplikasikan atau menunjang program pengajaran PMP. Kegiatan tersebut diselenggarakan karena berdasarkan spontanitas atau memang harus dilaksanakan misalnya memperingati hari besar, maulid Nabi, dan sebagainya.

Beberapa kegiatan yang dapat dijabarkan mempunyai kaitan dengan pelajaran PMP ialah:

- a) Penerapan beberapa tata tertib baik secara tertulis maupun lisan, dan berlaku bagi seluruh warga sekolah.
- b) Menyelenggarakan peringatan maulid Nabi.
- c) Menengok siswa yang sakit atau meninggal.
- d) Pernah mengadakan karyawisata ke berbagai tempat seperti tempat bersejarah, dan objek wisata lainnya.
- e) Mengadakan bimbingan secara khusus kepada siswa yang nakal, tidak mematuhi tata tertib dan peraturan sekolah.
- f) Mengundang nara sumber dari luar seperti dari kepolisian, dokter Puskesmas untuk memberi penjelasan tentang kesehatan, keamanan, dan penyalahgunaan narkotika.
- g) Sembahyang Jumat bersama yang dilaksanakan di mesjid terdekat.

Kegiatan tersebut ada yang dilaksanakan oleh sekolah/guru dan ada yang dilaksanakan oleh siswa.

3. Usaha penerapan nilai

Pelajaran PMP merupakan usaha untuk melestarikan nilai dan cita luhur Pancasila melalui pendidikan. Usaha melestarikan nilai ini dengan cara pengalihan nilai Pancasila kepada generasi penerus. Tentunya usaha pengalihan nilai ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Dengan kata lain mengajarkan Pancasila tahun 1950-an akan berbeda bentuknya dengan tahun 1980-an.

Para guru dan Kepala sekolah berpendapat bahwa nilai kepahlawanan, cinta tanah air, persatuan, merupakan nilai yang tetap diperlukan oleh para generasi penerus termasuk para siswa. Akan tetapi tentunya bentuk dari nilai tersebut akan berbeda dari jaman dahulu. Misalnya nilai kepahlawanan dahulu diberikan dengan menanamkan dan membina sifat patriotisme, akan tetapi sekarang diutamakan tentang rela berkorban dan tak henti-hentinya berjuang untuk mengisi kemerdekaan dan pembangunan.

Nilai cinta tanah air saat ini juga perlu tetap ditanamkan dengan penekanan pada menjaga kelestarian lingkungan dan kekayaan alam dan lain-lain. Dalam hal ini kepada siswa perlu ditanamkan bahwa tidak ada orang lain yang akan mencintai tanah airnya kecuali kita sendiri. Oleh karena itu setiap siswa harus mencintai lingkungannya, tidak merusak pohon, tidak mencoreti tembok dan sebagainya. Cinta tanah air tidak perlu berbentuk "hanya orang Indonesialah yang melakukannya, oleh karena itu orang asing harus pergi dari Indonesia". Ini suatu perasan kecintaan yang sempit dan negatif.

Begitu pula halnya dengan nilai persatuan, kapanpun kita harus bersatu. Dahulu kita bersatu untuk mengusir penjajah, akan tetapi sekarang kita berusaha untuk membangun bangsa, mengisi kemerdekaan dan berusaha untuk membina manusia Pancasila.

Para guru berpendapat bahwa nilai tersebut tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya juga harus terpadu. Nilai perjuangan, rela berkorban harus dilaksanakan dalam rangka

kepentingan nasional dengan semangat persatuan dalam rangka meningkatkan cinta tanah air.

Untuk merealisasikan pengalihan dan pembinaan nilai tersebut, tidak cukup melalui PMP saja, akan tetapi perlu diikuti dengan kegiatan penunjang, kegiatan yang mengkondisi agar siswa mencintai tanah airnya, tumbuh nilai kepahlawanannya untuk membela tanah airnya demi kepentingan nasional. Oleh karena itu sekolah menerapkan berbagai aturan dan tata tertib sebagai salah satu alat/media dalam menerapkan nilai tersebut melalui kehidupan sehari-hari.

Semua sekolah mempunyai aturan dan tata tertib, baik secara lisan maupun tertulis. Aturan ini adalah untuk membina disiplin, tanggung jawab, rasa memiliki dalam rangka menerapkan nilai Pancasila. Aturan tersebut berupa aturan umum sekolah atau aturan khusus yang hanya berkaitan dengan hal yang khusus saja, misalnya ketertiban kelas, aturan meminjam buku, pemakaian pakaian seragam dan sebagainya.

Penerapan aturan dan tata tertib ini sangat mudah dikontrol oleh sekolah, karena siswa selalu ada dalam pengawasan guru. Akan tetapi apabila sudah di luar sekolah, sekolah tidak dapat lagi mengontrol siswa, hanya dapat mengetahuinya saja kalau ada siswa yang merokok, siswa berkelahi dan sebagainya. Oleh karena itu sesungguhnya penerapan aturan, pengawasan terhadap pelaksanaan aturan dan sanksi yang diberikan di sekolah harus dilanjutkan di dalam masyarakat. Akan tetapi di masyarakat tidak seperti di sekolah, susah dikontrol, sulit diberikan sanksi. Di sekolah siswa melanggar sedikit saja aturan sekolah ditegur dan diperingatkan. Akan tetapi di masyarakat, memcoreti tembok, membongkar kunci orang, dia tidak diapa-apakan bahkan dianggap iseng.

Sekalipun semua sekolah sudah melaksanakan tata tertib ini dengan baik, namun tidak semuanya tertata dengan tertib. Sekolah di Jakarta pada umumnya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan di di sekolah luar Jakarta. Untuk memberlakukan aturan ini dengan

baik, sekolah menjalin hubungan yang erat dengan orang tua siswa dari mulai membuat aturan sampai dengan sanksi yang digunakan. Salah satu alat yang dianggap paling efektif dalam mengontrol siswa dan berfungsi sebagai alat saling memberikan informasi tentang siswa ialah "buku penghubung".

Disamping itu juga siswa diberikan formulir yang berupa surat perjanjian yang isinya secara umum ialah siswa akan patuh terhadap semua aturan di sekolah, terhadap guru dan Kepala sekolah. Dengan cara ini siswa juga menjadi segan untuk berbuat macam-macam.

Pemberian sanksi oleh sekolah juga sangat bervariasi, namun semua sekolah sudah melaksanakan sanksi ini baik berupa peringatan, teguran, sampai pada bentuk hukuman, misalnya dikeluarkan dari sekolah. Dari hasil pengamatan di sekolah, ternyata hanya di Jakarta ada siswa yang dikeluarkan dari sekolah karena nakal atau melanggar tata tertib. Sedangkan di luar Jakarta tidak terdapat siswa seperti itu.

Sanksi yang diberikan sampai saat ini tidak terdapat hukuman fisik, semua dalam bentuk teguran dan peringatan. Misalnya: SMP di Jakarta:

Teguran I : Berupa teguran disertai surat peringatan yang disampaikan ke orang tua.

Teguran II : Berupa teguran dan panggilan bagi orang tua siswa.

Teguran III: Orang tua siswa harus menghadap kepala sekolah.

Inilah usaha-usaha sekolah yang berusaha untuk menerapkan nilai luhur Pancasila melalui berbagai kegiatan, walaupun kegiatan tersebut bukan semata-mata khusus menunjang PMP.

4. Partisipasi masyarakat

Pendidikan tidak hanya merupakan tanggung jawab sekolah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Tanpa adanya dukungan dan partisipasi masyarakat, maka pendidikan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan pengamatan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampel, partisipasi dari masyarakat itu boleh dikatakan hampir tidak ada. Akan tetapi sekolah juga tidak menutup mata terhadap bantuan orang tua siswa (BP3), karena selama ini BP3lah yang membantu sekolah terutama dalam segi keuangan. Benarkah ini bantuan masyarakat? BP3 membantu terbatas selama anaknya bersekolah di sekolah tersebut, tetapi setelah anaknya lulus, orang tua tersebut (masyarakat) tidak pernah mau tahu lagi tentang sekolah.

Bantuan atau partisipasi masyarakat dalam arti luas, memang tidak begitu dirasakan, terutama di sekolah-sekolah luar Jakarta. Namun tidak demikian halnya dengan sekolah di Jakarta. Masyarakat di Jakarta cukup membantu terhadap sekolah walaupun bantuan tersebut bukan bersifat material. Bantuan atau partisipasi tersebut dapat berupa laporan atau informasi dari masyarakat tentang siswa, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Misalnya tentang kenakalan anak di luar sekolah atau apa saja.

Di beberapa sekolah lain di Jawa Barat umpamanya sering masyarakat (kepolisian, Pukesmas, masyarakat) membantu bimbingan atau penerangan kepada siswa di sekolah tentang kesehatan, bahaya narkoba, keamanan, kelalulintasan dan sebagainya. Ini juga merupakan partisipasi masyarakat. Namun sampai saat ini partisipasi itu belum terhadap PMP secara khusus. Misalnya kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, adalah program Penda setempat.

5. Faktor penghambat dan faktor pendukung

a. Faktor penghambat

- 1) Buku paket PMP di sekolah sangat kurang (18,8%) sehingga sulit bagi guru untuk memberikan tugas-tugas karena tidak semua siswa memiliki buku paket. Bagi siswa mampu, hal ini tidak menjadi masalah tapi bagi siswa kurang mampu tentu ini merupakan masalah tersendiri.

- 2) Tidak tersedia sama sekali alat peraga PMP, kalau membuat sendiri biayanya terlalu mahal dan sekolah tidak mempunyai anggaran untuk ini.
- 3) faktor lingkungan kurang menunjang, misalnya banyak atau terdapat materi PMP yang tidak sejalan dengan ajaran agama atau norma masyarakat. Misalnya: aliran kepercayaan, banyaknya kesewenangan yang lolos dari jangkauan hukum dan sebagainya. Ini membuat guru bingung.
- 4) Tes sumatif yang kisi-kisinya diberikan Kanwil kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diajarkan atau buku paket yang ada.
- 5) Letak sekolah yang kurang menguntungkan misalnya dekat terminal, dekat lokasi WTS dan sebagainya. Hal ini akan mengganggu kegiatan dan misi sekolah sebagai lembaga pendidikan.
- 6) Banyaknya kehidupan masyarakat yang bertentangan dengan tujuan PMP sehingga membuat kendornya kemampuan PMP sebagai mata pelajaran yang membawa misi pembinaan moral, misalnya pelanggaran lalu lintas, adanya penekapan dari satu golongan dan sebagainya.
- 7) Dalam pelaksanaannya di kelas, guru menghadapi berbagai kesulitan di antaranya:
 - a. Kurangnya buku pedoman guru (25%)
 - b. Tidak mempunyai GBPP PMP (25%)
 - c. Kurang menguasai materi PMP (25%)
 - d. Materi terlalu banyak (30%)
 - e. Bentuk tes yang dikembangkan tidak mengukur kemampuan siswa (24%)

b. Faktor pendukung:

1. Sekalipun buku paket sangat kurang, buku pedoman guru tidak ada namun tidak menyebabkan semangat guru mengendor. Mereka menambahnya dengan buku pegangan lain yang mereka punyai.

2. Guru mempunyai dedikasi yang tinggi sekalipun bukan dari jurusan PMP. Mereka juga "mampu" mengajar PMP dengan baik, dan bekerja keras dengan penuh pengorbanan demi anak didiknya.
3. Penataran dalam bidang studi PMP, juga banyak membantu guru dalam memperluas wawasan dan cakrawala mereka tentang PMP.

BAB 1V
TANGGAPAN GURU DAN KEPALA SEKOLAH
TERHADAP PENGAJARAN PMP

Dalam kajian program pengajaran PMP ini dilakukan pengamatan tentang bagaimana pelaksanaan program pengajaran PMP di sekolah, baik dalam kegiatan proses belajar mengajar maupun dalam praktek kehidupan sehari-hari di sekolah. Namun disamping terhadap pelaksanaan program pengajaran PMP, juga dilakukan wawancara dengan kepala sekolah dan guru untuk mengungkapkan tanggapan mereka tentang pengajaran PMP.

Hal ini sangat penting karena ungkapan dan tanggapan dari guru dan Kepala Sekolah sebagai pelaksana^a langsung di lapangan akan memberikan arti tersendiri, yaitu apa yang dia ungkapkan, atau pendapat dia tentang PMP didasari oleh landasan filosofis dan pengalaman yang mereka miliki dalam mengajar PMP. Disamping itu tanggapan para guru tersebut juga merupakan gambaran tentang apa yang dilaksanakan selama ini, tanpa ada yang disembunyikan.

Berikut ini ialah tanggapan dari para guru dan kepala sekolah:

1. Tujuan PMP

Para guru berpendapat bahwa PMP berbeda dengan mata pelajaran lainnya. PMP adalah pendidikan moral yang bertujuan mendidik, membina dan membimbing para siswa agar bermoral, berkepribadian dan bertingkah laku sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pancasila.

Dengan demikian yang menjadi sasaran PMP bukan saja pengetahuan agar siswa menjadi pintar akan tetapi merubah tingkah laku siswa agar menjadi manusia berwatak, bermoral dan taqwa terhadap Tuhan YME. Para guru sudah menyadari tujuan PMP, namun dalam melaksanakannya (operasional) terbatas kepada berbagai faktor yang ada di luar jangkauan mereka.

2. Kaitan PMP dengan mata pelajaran lain

Para guru berpendapat bahwa sesungguhnya bukan PMP saja yang membawa misi pembinaan moral, mata pelajaran lainpun tidak melepaskan diri dari pendidikan moral tersebut. Paling tidak dalam mata pelajaran lainpun moral harus tetap dipertahankan.

Di antara mata pelajaran lain yang lebih menekankan pada pembinaan moral ialah pendidikan agama. Pendidikan agama lebih menekankan pada pembinaan moral dalam hubungan dengan ke Tuhanan, beragama, sedangkan PMP menekankan pada pembinaan moral yang mengatur hubungan kenegaraan.

3. Persamaan dan perbedaan PMP dan P4

Para guru berpendapat bahwa PMP dan P4 mempunyai persamaan dan perbedaan, namun dari segi materi para guru berpendapat PMP dan P4 sama saja. Materi keduanya ialah tentang Pancasila, UUD'45, GBHN, dan PELITA, hanya P4 ditambah dengan materi KORPRI.

Dari segi lain misalnya metode penyampaian dan tujuan, guru juga tidak melihat suatu perbedaan yang jelas. Keduanya bertujuan agar warga negara dapat menghayati dan mengamalkan Pancasila. Sedangkan dari segi sasaran, nampak perbedaan yang jelas, PMP sasarannya siswa di sekolah dan P4 masyarakat luas atau warga negara Republik Indonesia. Kepala sekolah juga memberikan tanggapan yang hampir senada, yaitu terdapat perbedaan antara PMP dengan P4. Perbedaan tersebut ialah bahwa PMP merupakan suatu ilmu (seperti ilmu) yang bersifat formal dan diberikan melalui pendidikan formal. Sedang P4 bersifat tidak formal sehingga diberikan pada jalur pendidikan nonformal. Dari segi materi, maka PMP ditujukan pada pemahaman prinsip Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Sedangkan P4 lebih menyeluruh, meliputi KORPRI, kepegawaian dan sebagainya.

Dengan demikian PMP berperan untuk membina moral dalam jangka panjang, materi sudah disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa

dan jenjang sekolah. Sedangkan P4 merupakan pembinaan jangka pendek tanpa penyesuaian dengan situasi/kondisi masyarakat.

4. Lingkup materi per kelas

Para guru mempunyai pendapat yang berbeda tentang lingkup materi PMP antara tingkat kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Sebagian guru berpendapat bahwa tidak ada batas yang tegas antara materi yang diberikan di kelas I dengan kelas II dan kelas III. Hanya di kelas I dan II materinya jauh lebih banyak dan bersifat teoritis. Sedangkan di kelas III sudah banyak materi yang berkaitan dengan praktek atau pengalamannya.

Sebagian guru lainnya berpendapat bahwa lingkup materi antara kelas yang satu dengan lainnya sudah kelihatan dengan nyata. Namun di kelas yang lebih tinggi merupakan pendalaman, atau pengayaan dari kelas-kelas sebelumnya.

5. Penggunaan tes

PMP sebagai mata pelajaran yang bertujuan membina dan meningkatkan moral mestinya mempunyai alat ukur yang tepat untuk itu. Akan tetapi kenyataan para guru menggunakan jenis dan bentuk tes yang tidak berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Dengan demikian maka sulit untuk mengukur moral yang sebenarnya. Hal ini dilakukan karena tuntutan kurikulum lebih banyak tentang pengetahuan, EBTANAS/tes sumatif lebih banyak tentang pengetahuan dan tes untuk ini (pengetahuan) jauh lebih mudah disusunnya.

Namun demikian untuk menentukan angka raport dan kenaikan, guru juga mempertimbangkan segi lain misalnya ketaatan, kehadiran dan kepatuhan.

6. Ketumpangtindihan materi

Para guru sebagian berpendapat bahwa ada ketumpangtindihan antara materi PMP dengan mata pelajaran lain, misalnya dengan IPS tentang kependudukan dan transmigrasi. Mungkin sudut pandangan IPS

dan PMP tentang hal tersebut berbeda. Akan tetapi menurut pandangan guru sama saja. Begitu pula dengan Sejarah Nasional, terdapat beberapa hal yang tumpang tindih misalnya tentang perang kemerdekaan tahun 1947 - 1949 rasanya sama dengan PMP.

Dengan IPA misalnya tentang kekayaan alam, juga pembahasannya sama. Dengan demikian timbul suatu akibat dimana dalam tes, terdapat beberapa soal yang sama, artinya dapat dipakai di PMP atau pelajaran lain.

Sedangkan dalam ketumpangtindihan materi antar kelas, guru tidak melihat adanya ketumpangtindihan, karena kelas yang lebih tinggi merupakan pendalaman dan pengayaan dari kelas sebelumnya.

7. Topik PMP dalam buku paket

Para guru menyatakan bahwa topik GBPP dengan buku paket berbeda. Oleh karena itu para guru memutuskan untuk mengajar sepenuhnya dari buku paket. Disamping itu terdapat topik yang harus diajarkan, padahal dalam buku paket, dan GBPP tidak ada, misalnya Keluarga Berencana (KB). Guru tidak sempat untuk melihat topik yang harus diajarkan itu apakah sesuai dengan kebutuhan atau situasi lingkungan, hal ini tidak menjadi soal. Yang penting target kurikulum dapat tercapai, dan ketika tes dilaksanakan materi sudah selesai diberikan.

Sampai saat ini tes dan capaian kurikulum yang menjadi target acuan, bukan lingkungan. Ini juga disebabkan karena banyaknya materi yang harus diberikan terutama kelas I dan II.

8. Perbedaan GBPP dan Buku Paket

Perbedaan buku paket dengan GBPP (1984) bukan hanya karena topiknya/materinya saja, akan tetapi topik yang terdapat pada GBPP tersebut hanya sekitar 4 atau 5 buah saja yang ada miripnya dengan buku paket.

Disamping itu pendekatannya pun sangat berbeda, dimana buku paket seluruhnya tentang pengetahuan, sedangkan GBPP diarahkan

ke ranah afektif yang menitikberatkan pada aspek tingkah laku.

9. Keberhasilan belajar

Semua guru berpendapat bahwa mereka merasa berhasil mengajar apabila para siswa lulus ujian atau naik kelas dengan nilai PMP yang tinggi. Disamping itu juga mereka merasa senang apabila siswa bertingkah laku baik, patuh dan giat belajar serta disiplin. Namun untuk ini bukan hanya tugas PMP, guru lain juga menghendaki demikian.

Para guru menyadari, namun pada prakteknya untuk melaksanakan pembinaan moral, khusus dalam PMP itu sangat sulit, karena para guru merasa dikondisi (oleh topik buku paket, jam yang tersedia, banyaknya materi, lingkungan masyarakat) untuk membina segi pengetahuan saja.

10. Capaian kurikulum

Para guru juga dapat menilai sendiri apa yang mereka kerjakan, termasuk dalam pencapaian kurikulum. Dari hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa 62% guru selesai menyelesaikan materi kurikulum PMP yang harus diajarkan kepada siswa. Dan yang lainnya (38%) menyatakan terdapat sebagian kecil dari materi PMP yang tidak dapat diberikan pada akhir semester.

BAB V KOMENTAR DAN SARAN

Berikut ini adalah beberapa hal yang menarik untuk dikemukakan sehubungan dengan pengajaran PMP di sekolah, karena hal ini merupakan aspek yang tidak diduga akan tetapi sangat menentukan dalam pelaksanaan program pengajaran PMP di sekolah.

A. KOMENTAR

1. Latar belakang pendidikan guru PMP

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ternyata bahwa guru PMP di SMP sebagian besar (62%) tidak berlatarbelakang PMP sementara itu banyak para guru dari jurusan PMP yang tidak diberi tugas mengajar PMP. Hal ini tentunya kurang menguntungkan bagi program pengajaran PMP itu sendiri. Walaupun demikian guru-guru tersebut sangat menunjang sekali, karena guru dari jurusan PMP secara kuantitatif belum memadai, maka guru bukan dari jurusan PMP dapat menutupi kekurangan tersebut.

Pada dasarnya guru PMP baik yang berlatarbelakang pendidikan PMP maupun yang bukan PMP dalam menyampaikan materi (transformasi pengetahuan) tidak terdapat perbedaan yang menyolok. Pada akhirnya pengalamanlah yang banyak menentukan. Namun demikian karena sumber pokok bahan PMP adalah buku paket, tentunya para guru yang bukan berpendidikan PMP, pengetahuannya terbatas pada pengetahuan yang ada pada buku paket saja. Terbukti dari kenyataan di lapangan, apabila terdapat siswa yang bertanya diluar buku paket, maka guru tersebut kurang menguasainya. Untuk menyajikan PMP dengan baik maka peranan ilmu politik, hukum adat, hubungan internasional dan sebagainya banyak membantu. Dan hanya pada jurusan PMP-lah hal itu diperoleh.

2. Tujuan

Sampai saat kajian ini dilaksanakan, para guru PMP masih berpendapat bahwa tujuan belum begitu penting diketahui oleh siswa. Terbukti bahwa dalam setiap kegiatan proses belajar mengajar, belum ada guru yang mengemukakan tentang tujuan pengajaran PMP yang akan dilaksanakan. Dengan demikian bahwa pengajaran yang berorientasi pada tujuan belum dapat terjadi.

Menurut pendapat guru pernah tujuan itu diberitahukan pada siswa, tetapi hal tersebut tidak mempunyai pengaruh apa-apa, tentunya tidak berpengaruh terhadap proses belajar mengajar maupun terhadap keberhasilan siswa. Dengan demikian, untuk menghemat waktu, tujuan tidak perlu diberitahukan pada siswa yang penting diberikan materi sebanyak-banyaknya sesuai dengan kurikulum, dan itu sudah dianggap memadai.

3. Alat Peraga

Selama pengamatan dilaksanakan tertentu dalam PBM PMP, sangat sulit untuk menemukan guru menggunakan alat peraga dalam mengajar. Berdasarkan keterangan dari beberapa guru, sekolah sama sekali tidak mempunyai alat peraga. Disamping itu guru masih sulit untuk menentukan alat peraga apa yang mesti ada dan digunakan selain gambar tokoh dan para pahlawan.

Untuk membuat sendiri alat peraga rasanya sangat sulit bagi guru, disamping menyita waktu, guru juga tidak mempunyai keahlian dan memerlukan biaya meskipun biaya itu tidak besar, tapi kalau banyak dan harus mengeluarkan biaya sendiri rasanya berat. Oleh karena itu guru berharap pemerintah menyediakan alat peraga atau biaya untuk membuat alat peraga.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pernah memproduksi buku "Disain alat peraga bidang studi PMP untuk SMP dan SMIA", yang dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam menggunakan alat peraga akan tetapi buku tersebut sampai saat ini tidak dimiliki oleh sekolah.

4. Buku paket

Buku paket merupakan satu-satunya buku wajib bagi siswa dan merupakan buku pegangan pokok bagi guru. Ternyata bahwa buku paket ini sangat kurang. Dari hasil pengamatan ternyata bahwa terdapat 16,8% yang tidak mempunyai buku paket.

Oleh karena Topik/materi yang disajikan dalam buku paket tidak seluruhnya atau sebagian saja yang cocok dengan GBPP, maka materi dalam GBPP hanya sebagian saja yang dapat diberikan pada siswa. Disamping itu sebagian besar materi buku paket bersifat pengetahuan, oleh karena itu guru mengajarnya juga hanya pengetahuan saja.

5. Pengalihan nilai

Nilai Pancasila dituangkan dalam TAP MPR, dijabarkan dalam kurikulum/GBPP dan disajikan dalam buku paket serta dioperasionalkan melalui proses belajar mengajar. Akan tetapi dalam proses belajar mengajar agak sulit untuk mengalihkan nilai, yang dapat dilakukan ialah pengetahuan yang berisi nilai dengan mengemukakan contoh-contoh kejadian tentang kepahlawanan, persatuan, cinta tanah air dan sebagainya. Dengan cara ini pengalihan nilai dapat dilaksanakan, namun oleh karena sumber yang digunakan oleh guru ialah buku paket, maka buku paket tersebut harus memuat secara utuh nilai Pancasila tersebut.

Untuk mengalihkan nilai Pancasila jangan terlalu berharap bahwa guru akan dapat memilih topik dan nilai yang cocok dengan kondisi dan situasi yang ada, atau memasukkan nilai tertentu pada topik PMP, karena itu tidak mungkin dilakukan oleh guru berhubung dengan berbagai keterbatasannya baik waktu, kemampuan dan sebagainya. Oleh karena itu dalam bidang studi PMP para penyusun buku paket harus menyajikan materi yang berbeda dengan bidang studi lain, dimana pesan nilai harus sudah dimasukkan.

6. Tes

Tes yang dilaksanakan di SMP ialah tes formatif, sumatif dan EBTA. Tes formatif disusun oleh guru sendiri, sedangkan tes sumatif disusun guru akan tetapi sudah diberikan kisi-kisi oleh Kanwil. Dalam beberapa hal, kadang-kadang materi di luar buku paket, atau belum diajarkan sama sekali, dan hal ini sering terjadi. Dengan demikian guru terpaksa mengajarkan materi yang belum disajikan tersebut secara maraton

Untuk menentukan kenaikan kelas dan kelulusan nilai PMP harus minimal 6. Hal ini menimbulkan dampak yang positif baik bagi guru maupun siswa (siswa pandai) yaitu motivasi belajar mereka jauh lebih meningkat. Akan tetapi bagi siswa yang lambat, mereka menjadi acuh, biar saja nilai PMP dapat 3 karena pada akhirnya akan ditolong guru menjadi 6. Untuk mengimbangi hal tersebut guru mencoba mengamati tingkah laku siswa sehari-hari misalnya kerajinan dalam belajar, kehadiran dan sebagainya yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai.

Para guru berpendapat sampai saat ini belum ada alat ukur yang tepat untuk pendidikan moral, dan ini sulit dilaksanakan, oleh karena itu sistem penilaian tetap saja sama dengan mata pelajaran lainnya.

8. Penerapan nilai PMP

Penerapan nilai PMP ke dalam tingkah laku siswa di sekolah tidaklah terlalu sulit dilakukan. Hal ini bisa dilakukan melalui kegiatan upacara sekolah, peringatan hari-hari besar nasional, dan sebagainya. Dalam hal ini tergantung sepenuhnya pada sekolah/guru, oleh karena itu sekolah/guru harus mengkondisi siswa atau memotivasi siswa kearah tingkah laku yang sesuai dengan PMP. Kegiatan yang sesuai untuk ini ialah memberlakukan beberapa aturan dan tata tertib, melakukan pengawasan yang ketat, menyediakan sarana yang mengkondisi siswa agar berlaku baik, misalnya tempat sampah, lapangan upacara yang memadai, keteladanan guru dan

sebagainya. Disamping itu tingkah laku siswa di sekolah sepenuhnya dapat dikontrol, misalnya tidak mengikuti upacara sekolah, melakukan upacara yang tidak sesuai dengan prosedur, salah menempatkan bendera dan sebagainya. Apabila ada hal seperti ini, guru akan secepatnya menegur atau membetulkannya.

Akan tetapi pembinaan yang dilakukan di sekolah itu tidak berlanjut dengan di luar sekolah, terutama di masyarakat. Sekalipun di sekolah sudah dibina dengan baik dengan penuh disiplin, akan tetapi ini tidak berlanjut ketika ia berada di masyarakat. Sehingga apa yang sudah dibina di sekolah, menjadi meluntur dan terkena erosi apabila berada di masyarakat.

Contoh:

Di sekolah tidak boleh siswa mencoreti tembok, merusak pohon-pohonan, karena kalau ada siswa yang melakukan hal seperti itu, maka pasti dihukum oleh guru. Akan tetapi ketika ia pulang sekolah, ia melihat seorang remaja tanggung yang mencoreti tembok, merusak pohon dan sebagainya, tidak ada seorang pun yang menegur atau menghukum. Siswa akan kaget karena norma dan kebenaran di sekolah berbeda dengan di masyarakat. Hal seperti ini akan mengguncangkan jiwa siswa, dan tentunya siswa akan tidak mempercayai kebenaran yang diperoleh di sekolah bahkan akan mengikuti arus dalam masyarakat.

9. Ketumpangtindihan Materi

PMP diajarkan di tiap kelas dan tiap jenis sekolah. Materi yang diajarkan ialah sila demi sila dengan 36 butir P4. Sepintas dilihat adanya ketumpangtindihan materi karena yang diajarkan di kelas I, kelas II dan kelas III pada dasarnya ialah 5 sila Pancasila.

Akan tetapi, sesungguhnya tidaklah demikian, karena kelas yang lebih tinggi merupakan pendalaman, pengayaan dan perluasan dari materi yang diajarkan sebelumnya di kelas I dan II. Untuk jelasnya dapat kita lihat buku paket PMP, misalnya diambil tentang sila I Ketuhanan Yang Maha Esa.

Buku paket kelas I : Agama-agama di Indonesia

Buku paket kelas II : Kita menghormati agama dan kepercayaan orang lain

Buku paket kelas III: Mengenalkan sila Ketuhanan YME.

Berdasarkan buku paket tersebut, jelas bahwa tidak terdapat ketumpangtindihan materi antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya, sekalipun untuk sila yang sama. Topik tersebut menunjukkan adanya perluasan dan pendalaman dari topik di kelas sebelumnya.

Disamping anggapan adanya ketumpangtindihan antara kelas, juga ada anggapan lain tentang ketumpangtindihan antara PMP dengan mata pelajaran lainnya, misalnya dengan Sejarah Nasional tentang perang kemerdekaan tahun 1947 - 1949, dengan IPS tentang masalah transmigrasi dan dengan IPA tentang Keluarga Berencana (tidak ada dalam buku paket, tapi harus diajarkan) dan kekayaan alam.

Tentunya secara teoritis, sekalipun topiknya bersamaan, namun sudut pandangannya berbeda-beda. Akan tetapi tidak demikian halnya menurut pandangan guru, para guru berpendapat bahwa materinya sama saja, baik cara penyajian maupun isi. Sehingga dalam suatu tes, satu soal dapat digunakan untuk beberapa mata pelajaran.

10. Memilih topik PMP

Semestinya suatu materi kurikulum dapat disajikan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Untuk ini para guru dapat memilih topik-topik yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya guru tidak memilih topik-topik tersebut dengan berbagai alasan di antaranya topik sudah disajikan berurut, tidak ada waktu untuk memilih-milih topik, tidak perlu dipilih-pilih karena semuanya harus diberikan.

Berdasarkan keadaan tersebut, maka usaha untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat tidak pernah dilakukan, yang pernah dilakukan guru ialah memasukkan unsur lingkungan dalam pengayaan materi, berupa contoh dari kehidupan sehari-hari.

11. Dampak PMP

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa PMP bukanlah satu-satunya mata pelajaran yang menekankan terhadap pembinaan moral, tetapi pendidikan agama juga mempunyai tugas yang sama. Oleh karena analisis yang dilakukan belum pada tahap korelasi maka agak sulit untuk mengetahui dampak PMP terhadap aktivitas moral siswa. Namun demikian perbedaan itu akan mudah dilihat apabila dikaitkan dengan kehidupan kenegaraan, misalnya terhadap kedisiplinan upacara sekolah, sikap dalam menghormati para pahlawan, sikap hormat terhadap bendera, saling menghargai sesama agama, suku, adat, dan budaya masing-masing.

Dari data yang diperoleh dari lapangan (terlampir) ternyata bahwa pada dasarnya siswa SMP mempunyai sikap yang pasif baik terhadap hubungan kenegaraan maupun hubungan kemasyarakatan. Dalam hubungan kenegaraan dapat dipastikan sebagai dampak dari PMP, akan tetapi dalam hubungan kemasyarakatan tidak diketahui apakah dampak sepenuhnya PMP atau dampak yang lain (analisis kemudian).

Hal lain yang perlu dikemukakan ialah bahwa pembinaan moral di sekolah tidak berlanjut dengan pembinaan yang ada dalam masyarakat. Hal yang diajarkan dalam PMP bersifat baik-baik saja dan kadang-kadang normatif, yang sudah diyakini kebenarannya. Hal ini tidak selaras dengan yang ada dalam masyarakat, misalnya banyak melanggar lalu lintas, merusak lingkungan, tidak saling menghormati antar sesama, tidak saling membantu dan sebagainya. Hal ini akan menimbulkan kesangsian dan kebaikan yang diterima di sekolah akan luntur dan hilang kembali.

Inilah beberapa hal yang perlu dikemukakan dan sebagai bahan masukan bagi program pengajaran PMP, terutama dalam membina moral generasi penerus.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam rangka meningkatkan program pengajaran PMP di sekolah:

1. Oleh karena banyak guru yang tidak berlatarbelakang pendidikan PMP, yaitu sebanyak 62%, dan di antara mereka terdapat 16% yang belum ditatar PMP, maka sebaiknya penataran terus dilakukan, sehingga semua guru yang mengajar PMP ditatar. Disamping itu karena PMP merupakan pendidikan moral, maka penataran sebaiknya dilakukan tidak hanya berdasarkan pada aspek pengetahuan tetapi juga aspek nilai (value).
2. Sampai saat ini orientasi pelajaran PMP belum terhadap tujuan, tapi pada pengetahuan. Disamping itu sistem yang dilaksanakan juga tidak mengkondisi guru/siswa untuk menyadari tentang tujuan. Oleh karena itu harus dicarikan suatu sistem beserta penunjangnya agar dapat berorientasi pada tujuan, misalnya menampilkan TIK dan TIU dalam buku paket, tes tidak terlalu berorientasi pada pengetahuan, tapi juga sikap dan sebagainya.
3. Oleh karena hampir semua sekolah kekurangan atau tidak mempunyai alat peraga, sedangkan sekolah tidak menyediakan alat peraga, maka sebaiknya pemerintah membuat alat peraga baku untuk dibagikan kepada sekolah, atau menyediakan anggaran bagi sekolah untuk pembuatan alat peraga.
4. Oleh karena hampir semua sekolah kekurangan buku paket, padahal buku paket merupakan satu-satunya buku wajib bagi siswa, maka sebaiknya pemerintah mengirim langsung buku paket tersebut ke sekolah, dengan pengawasan yang ketat. Disamping itu pembaharuan dan penyempurnaan terhadap buku paket perlu segera dilaksanakan agar sesuai dengan GBPP Kurikulum 1984.

5. Oleh karena adanya anggapan tentang ketumpangtindihan antara PMP dengan mata pelajaran lain terutama dengan Sejarah Nasional disamping mata pelajaran lainnya, maka perlu adanya peninjauan ulang tentang materi mata pelajaran tersebut, dan perlu adanya batasan (scope) yang jelas antara PMP dengan Sejarah Nasional dan mata pelajaran lainnya.
6. Sistem evaluasi yang saat ini dilakukan di SMP ialah menggunakan beberapa tes baik tes formatif, tes sumatif maupun Ehta. Dari semua tes yang dilaksanakan adalah tes pengetahuan, dan belum ada alat ukur yang dapat mengukur tentang moral. Sehubungan dengan itu perlu diupayakan agar PMP sebagai pendidikan moral mempunyai alat ukur yang tepat dan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh guru saja.

Disamping itu karena nilai tes PMP minimal 6, menimbulkan berbagai dampak baik positif maupun negatif, di antaranya siswa menjadi acuh terhadap PMP. Hal ini disebabkan karena sekalipun ia mempunyai nilai di bawah 5 (tidak naik), akhirnya menjadi 6 karena ditolong guru. Untuk itu para guru harus menghindarkan sistem menolong seperti ini, lagi pula kebijakan tentang apabila nilai PMP kurang dari 5 tidak naik, perlu ditinjau kembali, misalnya dengan memasukkan beberapa kriteria seperti mempertimbangkan nilai pelajaran lain, dan nilai sebelumnya dan sebagainya.

7. Guru PMP mengajar berdasarkan pola yang sudah baku, yaitu dari hari ke hari proses belajar mengajar yang dilaksanakan ialah apersepsi, penyampaian bahan dan evaluasi. Dengan demikian guru tidak perlu repot-repot untuk merencanakan kegiatan belajar, karena kegiatan belajar akan berjalan sebagaimana biasa. Berhubung dengan kebiasaan seperti itu, kiranya dalam buku paket setiap topik harus ada anjuran tentang metode yang tepat untuk digunakan dalam topik tersebut, dengan petunjuk melaksanakannya. Dengan demikian guru akan dituntun untuk melaksanakan metode yang dianjurkan.